

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini perkembangan teknologi dan globalisasi menciptakan persaingan yang ketat dalam dunia bisnis. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan perlu lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan untuk lebih membantu pengambilan keputusan dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang semakin berubah. Setiap tahun perusahaan yang melakukan penawaran umum kepada publik (perusahaan *go public*) diwajibkan untuk menyampaikan laporan perusahaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut berupa laporan tahunan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2016).

Laporan keuangan tahunan pada perusahaan *go public* merupakan sumber informasi bagi para *stakeholder* seperti investor, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan dalam hal tersebut. Berbagai pertimbangan akan dilakukan oleh para investor sebelum melakukan penanaman modal pada perusahaan. Para investor akan menelaah secara teliti laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Sebelum menginvestasikan dana pada perusahaan publik, investor mempertimbangkan bagaimana manajemen perusahaan akan memberikan pengungkapan yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam laporan keuangannya, sehingga dapat mempercayakan dananya pada keputusan investasi yang tepat.

Harapan investor adalah dana yang telah diinvestasikan dapat menghasilkan pengembalian yang wajar dan memadai. Investor menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar landasan untuk lebih meyakinkan investor dalam pengambilan keputusan dan memperoleh hasil sesuai yang dikehendaki dengan tingkat risiko tertentu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder*, perusahaan harus melakukan pengungkapan sukarela terhadap laporan keuangannya secara transparan dan lengkap untuk mendukung keputusan yang optimal. Perusahaan yang kurang transparan akan menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder*.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus terkait dengan pengungkapan informasi diantaranya PT Envy Technologies Indonesia Tbk yang diminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberikan penjelasan mengenai laporan keuangan konsolidasian periode 2019. BEI menduga bahwa PT Envy Technologies Indonesia Tbk telah melakukan praktik manipulasi laporan keuangan yang dikonsolidasi dengan laporan keuangan dari anak perusahaan, yaitu PT Ritel Global Solusi. BEI menduga hal tersebut dikarenakan pendapatan dan laba bersih PT Envy Technologies Indonesia Tbk mengalami kenaikan yang signifikan dan tidak lazim dari tahun sebelumnya serta PT Ritel Global Solusi tidak menyusun laporan keuangan tahun 2019. PT Envy Technologies berpotensi untuk menghadapi penghapusan saham (*delisting*) apabila perusahaan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan (CNBC Indonesia: Sandria, 2021). Kasus tersebut membuktikan bahwa pentingnya perusahaan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan jelas, selain untuk menguntungkan *stakeholder* laporan keuangan yang transparan

juga menghindarkan perusahaan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian pula dengan dua perusahaan berikut ini.

Tabel 1.1
Perbandingan Perusahaan Sektor Infrastruktur

Perusahaan Sektor Infrastruktur				
	PT Smartfren Telecom Tbk		PT Acset Indonusa Tbk	
	2017	2018	2017	2018
Laba (Rugi) Usaha	(3.022.736)	(3.552.834)	465.900.000.000	699.287.000.000
Harga Saham (Rupiah)	50	78	2.460	1.555
Saham yang Beredar (Lembar)	103.705.870.101	171.114.685.667	700.000.000	700.000.000

Sumber : Laporan Tahunan diolah Peneliti

Laporan tahunan PT Smartfren Telecom Tbk menunjukkan bahwa kerugian yang dialami pada tahun 2018 meningkat sebesar 1,17% dibandingkan tahun 2017. Harga saham PT Smartfren Telecom Tbk sebesar 50 rupiah pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 harga saham PT Smartfren Telecom Tbk naik menjadi 78 rupiah. Saham yang beredar pada tahun 2017 sebanyak 103.705.870.101 lembar dan 171.114.685.667 lembar saham yang beredar pada tahun 2018. Di sisi lain PT Acset Indonusa Tbk belum mengungkapkan kerugiannya untuk tahun 2017 dan harga saham pt acst mengalami penurunan dari 2.460 rupiah menjadi 1.555 rupiah dan jumlah saham yang beredar adalah 700.000.000 lembar. Perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk mengalami kerugian, namun manajemen menginformasikan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan sedang menghadapi berbagai masalah seperti lemahnya kinerja manajemen serta perusahaan juga

mencantumkan target usaha untuk tahun berikutnya. Investor lebih tertarik pada perusahaan yang memberikan sinyal tentang kondisi perusahaan, sehingga investor dapat mengantisipasi risiko apa yang mungkin terjadi.

Informasi laporan keuangan yang diungkapkan oleh suatu perusahaan meliputi informasi wajib yang disebut sebagai pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan informasi sukarela yang disebut sebagai pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Menurut Hidayat (2017) Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagaimana ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan *go public* ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 29/POJK.04/2016 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 2016). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan secara sukarela melebihi pengungkapan yang telah diwajibkan oleh peraturan yang berlaku (Fitriana & Prastiwi, 2014).

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Rokhlinasari (2015) menggambarkan suatu perusahaan sebagai titik temu antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang dimana wewenang serta tanggung jawab manajemen maupun pemilik perusahaan tersebut diatur dalam kontrak kerja yang merupakan persetujuan bersama. Dalam melakukan pengungkapan informasi yang akan mengalihkan

perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba dan isu-isu lainnya merupakan tanggung jawab manajer sebagai agen yang harus selalu berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak *principal*. Sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan terus meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi tersebut.

Luas pengungkapan informasi setiap perusahaan yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan risiko dan karakteristik pada masing-masing perusahaan. Pengungkapan sukarela dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan yang dianggap relevan dan mendukung pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *stakeholder*. Untuk melakukan peningkatan kredibilitas perusahaan dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu melalui pengungkapan sukarela. Perusahaan akan dibebaskan untuk memilih dalam pemberian informasi yang mendukung dan relevan terhadap pengambilan keputusan oleh yang bersangkutan atau para pemakai tahunan. Ada banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tingkat *leverage*, tingkat likuiditas, kepemilikan saham publik, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Leverage adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan aset atau modal dengan biaya tetap (utang atau ekuitas) untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam (Fitriana & Prastiwi, 2014) prediksi dalam teori keagenan menyebutkan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan lebih

banyak mengungkapkan informasi. Hal ini karena biaya keagenan akan lebih tinggi untuk perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu (Fitriana & Prastiwi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2015), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini karena perusahaan yang memiliki utang atau *leverage* yang tinggi perlu pengawasan yang tinggi pula. Sama halnya dengan penelitian (Fitriana & Prastiwi, 2014) yang menyatakan *leverage* berpengaruh namun negatif terhadap pengungkapan sukarela, hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan kondisi *leverage* yang tinggi manajemen perusahaan akan cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapan informasi karena khawatir penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam pengembalian utang. Berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (Awadallah, 2017; Wardani, 2012; Wulandari & Laksito, 2015).

Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utangnya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi utangnya pada saat ditagih (Munawir, 2021:31). Hubungan antara teori keagenan dengan likuiditas adalah bahwa likuiditas yang rendah menunjukkan kemampuan manajemen untuk membayar utangnya, tetapi profitabilitas dan keuntungan akan menjadi lebih rendah. Hal tersebut menyebabkan perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang seperlunya saja. Dengan demikian, investor kurang tertarik untuk menanamkan modal, harga saham tetap rendah, dan imbas hasil menurun.

Pada penelitian Gunawan (2015) menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Sama halnya dengan penelitian Indriani (2013) serta Wulandari & Laksito (2015) juga menyatakan berpengaruh namun negatif terhadap pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan tingkat likuiditas yang rendah menggambarkan kinerja perusahaan yang lemah. Dengan kondisi seperti ini, pihak manajemen cenderung memiliki dorongan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih rinci sebagai upaya untuk menjelaskan alasan lemahnya kinerja manajemen. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Awadallah (2017); Damayanti (2016) serta Wardani (2012) yang menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Kepemilikan saham publik adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh investor publik selain manajemen dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Kepemilikan saham oleh publik menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Teori keagenan menyatakan bahwa semakin luas kepemilikan saham suatu perusahaan, maka semakin banyak informasi sukarela yang diharapkan dari perusahaan dalam rangka mengurangi biaya keagenan. Hal ini karena manajemen cenderung membebankan biaya tambahan dari pemegang saham untuk meningkatkan tata kelola perusahaan (Damayanti, 2016).

Kepemilikan saham oleh publik juga memberikan arti bahwa, publik ikut serta ambil bagian memiliki perusahaan sebesar porsi saham yang dimilikinya terhadap perusahaan tersebut. Jika semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan, maka semakin banyak pula detail yang harus di

buka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan akan semakin lengkap (Simanjuntak & Widiastuti, 2004). Pada penelitian Damayanti (2016) dan Indriani (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Berbeda dengan penelitian dari Wardani (2012) yang menyatakan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Kantor Akuntan Publik adalah entitas yang memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Tugas Kantor Akuntan Publik adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada *stakeholders*. Teori keagenan menyatakan diperlukan pihak independen yang menjembatani konflik antara *principal* dan *agent* dalam upaya untuk menekan masalah asimetri informasi. Pihak independen yang dimaksud adalah auditor independen atau Kantor Akuntan Publik. Perusahaan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) berukuran besar diharapkan dapat mengungkapkan informasi keuangan dengan lebih luas karena Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut memiliki insentif untuk melindungi reputasinya sehingga harus lebih transparan dan mendorong luasnya pengungkapan di laporan keuangan.

Hasil penelitian dari Awadallah (2017); Barros et al. (2013); Boateng et al. (2022); Fitriana & Prastiwi (2014); serta Hidayat (2017) yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* dapat memaksakan perusahaan untuk

mengungkapkan informasi yang relevan dan secara komprehensif tentang keputusan perusahaan untuk mempertahankan reputasi perusahaan (Firth dalam Sehar et al., 2013). Dengan adanya kinerja audit yang baik serta reputasi perusahaan yang baik oleh Kantor Akuntan Publik *big four*, maka manajemen perusahaan akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan sukarela yang lebih luas dan transparan. Pernyataan dari hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Damayanti (2016) dan Indriani (2013) yang menyatakan Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan infrastruktur yang terdaftar pada BEI pada periode tahun 2017-2019. Alasan penulis menggunakan laporan tahunan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan penulis ingin mengetahui kinerja perusahaan ketika keadaan perekonomian sedang stabil. Hal ini dapat dikatakan stabil dikarenakan tidak adanya pengaruh eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan contohnya pada saat terjadinya pandemi covid-19. Jika penulis menggunakan laporan tahunan sampai dengan tahun 2020 hingga 2021 besar kemungkinan laporan keuangan serta kinerja perusahaan dalam periode tersebut tidak stabil. Hal tersebut dapat terjadi karena pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian maupun laporan keuangan perusahaan.

Pengungkapan sukarela sangatlah menarik untuk diteliti karena pengungkapan sukarela dapat mengurangi kesenjangan asimetri antara perusahaan dan *stakeholder*. Alasan lain penelitian ini penting untuk dilakukan karena hasil dari beberapa penelitian mengenai pengungkapan sukarela khususnya terkait

dengan *leverage*, likuiditas, kepemilikan publik, dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak konsisten atau beragam. Penelitian ini fokus pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2017-2019. Berdasarkan latar belakang maka judul yang digunakan dalam penelitian adalah **“Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Kepemilikan Publik, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, muncul beberapa pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?
4. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan sukarela?

2. Untuk membuktikan pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan sukarela?
3. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan sukarela?
4. Untuk membuktikan pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap pengungkapan sukarela?

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Ilmu Pengetahuan (Akademis)

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi referensi atau dasar untuk penelitian yang serupa serta untuk meningkatkan dan memperluas penelitian.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan aspek pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan sehingga mencapai akuntabilitas publik dan transparansi. Penelitian juga diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan pemangku kepentingan keuangan lainnya untuk lebih memahami praktik pengungkapan sukarela di Indonesia, yang pada akhirnya akan membuat keputusan investasi yang lebih baik di pasar modal.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Berisi gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, Hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, deskripsi variabel yang akan diuji, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

4. Bab IV Gambaran Subyek Penelitian

Menjelaskan terkait gambaran subyek penelitian yang berisi tentang populasi serta sampel penelitian yang digunakan. Kemudian, menjelaskan analisis hasil data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Selain itu juga,

bab ini menjelaskan pembahasan yang berisi dari hasil analisis data penelitian.

5. Bab V Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian ini dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.